Available online at **FACTUM**; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
website: https://ejournal.upi.edu/index.php/Factum
***FACTUM**: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 14*(1), 23-34

RESEARCH ARTICLE

ABRI Masuk Desa Kodam III Siliwangi: Program Pembangunan Desa Masa Orde Baru (1980-1998)

Ricco Jefryargo Ardi Laksana
Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Pendidikan Indonesia
Corresponding Author: riccojal@student.upi.edu

To cite this article: Laksana, R.J.A. (2025). ABRI Masuk desa kodam iii siliwangi: program pembangunan desa masa orde baru (1980-1998). ***FACTUM**: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 14*(1), 23-32. https://doi.org/10.17509/factum.v14i1.39210.

Abstract

This study aims to determine the development of the ABRI Entering Village (AMD) program from the beginning until the end of the New Order system in 1980-1998. This study uses a historical research method, with four important steps, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The research sources were collected from several sources, including the Library of the Indonesian Education University (UPI), the Batoe Api Jatinangor Library, the National Library of the Republic of Indonesia, the Central Library of the Army History Service, and the Indramayu Regency Library. The results of of this study: 1) the AMD program was motivated by internal factors namely domestic socio-political conditions as a result of the 1965 G30S incident, and external factors namely the development of communism ideology in the world; 2) the AMD program has been implemented successfully so that there is a currently sustainable development program with the same theme called the Manunggal Army to Build Villages (TMMD); 3) the AMD program has had a positive impact on the community, such as reviving the spirit of mutual cooperation and the community's sense of trust in ABRI.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan program ABRI Masuk Desa (AMD) mulai dari awal pembentukan hingga menjelang berakhirnya sistem Orde Baru tahun 1980-1998. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, dengan empat langkah penting yakni heuristik, kritik, interprestasi, dan historiografi. Sumber penelitian dikumpulkan dari beberapa sumber, di antaranya Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Perpustakaan Batoe Api Jatinangor, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Pusat Dinas Sejarah Angkatan Darat (Disjarahad), dan Perpustakaan Kabupaten Indramayu. Dari penelitian ini diketahui: 1) program AMD dilatarbelakangi oleh faktor internal yang berasal dari kondisi sosial politik dalam negeri dampak peristiwa G30S 1965, dan faktor eksternal yaitu berkembangnya paham komunisme di dunia; 2) program AMD cukup berhasil dilaksanakan sehingga saat ini terdapat program pembangunan yang berkelanjutan dengan tema yang sama bernama Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD); 3) program AMD memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti memupuk kembali semangat gotong royong dan rasa kepercayaan rakyat terhadap ABRI.

© 2025 Tim pengembang Jurnal UPI

Article Info

Article History:
Received 29 Sept. 2021
Revised 1 April 2025
Accepted 25 April 2025
Available online 25 April 2025

Keyword:
ABRI; New Order; village development.

Kata Kunci:
ABRI Masuk Desa (AMD); pembangunan desa; Orde Baru

PENDAHULUAN

Pasca kemerdekaan, Indonesia mengalami banyak kekacauan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi, Indonesia mengalami krisis ekonomi nasional yang disebabkan oleh inflasi dan pengeluaran pemerintah yang kurang efisien pada masa tersebut. Dalam bidang sosial, Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk yang siginifikan dan terjadi urbanisasi dalam jumlah yang besar-besaran. Dalam bidang politik terjadi konflik ideologi antar partai dan lembaga pemerintah yang berdampak juga pada masyarakat anggota atau partisipan partai-partai tersebut. Kemudian dalam bidang pertahanan dan keamanan, Indonesia menghadapi Agresi Militer Belanda dan pemberontakan yang terjadi dari beberapa daerah. Berbagai macam kekacauan tersebut berdampak juga terhadap stabilitas dalam masyarakat.

Pemerintahan pada masa Orde Baru berupaya menciptakan dan mengembalikan stabilitas dalam kehidupan bernegara dengan melaksanakan pembangunan nasional. Program-program pembangunan nasional yang dirancang oleh pemerintah pada saat itu melibatkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai pelaksana. Penugasan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut merupakan salah satu bentuk dwifungsi ABRI serta bertujuan juga untuk menjamin tercapainya sasaran program-program pembangunan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun atau disebut juga Repelita (Soebijono, 1992, hlm. 135).

Pelibatan ABRI dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut bukan karna tanpa alasan, melainkan karna tujuan utama dari pembangunan nasional adalah rakyat Indonesia, dan ABRI dinilai memiliki persatuan bersama rakyat yang manunggal. Anggota ABRI berasal dari rakyat-rakyat yang memiliki tekad untuk bangkit berjuang menghilangkan penjajahan yang dialami bangsa Indonesia. Dasar perjuangan ABRI dalam melawan penjajahan adalah keadilan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, ABRI mendapatkan kepercayaan yang baik dari rakyat. Kepercayaan dari rakyat tersebut diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan program-program pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh ABRI.

Pada tahun 1980, Jenderal M. Jusuf yang saat itu diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan oleh Presiden Soeharto, meluncurkan program ABRI Masuk Desa (AMD). Program tersebut merupakan program yang terfokus pada pembangunan masyarakat pedesaan. Pemilihan desa sebagai sasaran pembangunan didasari karena desa merupakan basis pertahanan rakyat dalam hal bela negara (Pusponegoro & Notosusanto, 1993, hlm. 600).

Selain itu, desa juga memiliki potensi alam yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumber daya alam yang ada di desa dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pasokan bahan pangan, dan sumber daya manusianya dapat dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional (Mukmin, 1991, hlm. 43)

Program AMD memiliki tujuan lain selain pembangunan nasional, yakni menguatkan kembali konsep kemanunggalan ABRI dengan rakyat yang merupakan modal penting dalam menciptakan persatuan Nasional. Sebelum adanya program ini, hubungan antara ABRI dengan rakyat mengalami erosi disebabkan oleh semakin banyak dan tingginya posisi ABRI dalam pemerintahan yang memunculkan sikap angkuh dalam personel ABRI. ABRI Masuk Desa (AMD) juga dimaksudkan untuk meningkatkan citra ABRI serta memperkuat perannya sebagai sebuah organisasi yang berakar-dalam pada ikatan sosial negara Indonesia (Singh, 1996, hlm. 111).

Melalui program AMD, desa yang menjadi sasaran mulai menatar diri dan diharapkan dapat menghasilkan produk yang dapat menyuplai kebutuhan pembangunan nasional. Selain itu, program AMD juga turut menanamkan nilai bela negara kepada masyarakat yang ada di daerah. Secara tradisional, nilai bela negara

telah terlaksana dalam bentuk ronda kampung. Masyarakat desa diberikan ceramah untuk meningkatkan kesadaran bahwa melaksanakan ronda bukan sekadar menjaga keamanan desa tetapi juga dalam rangka bela negara sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Disjarhad, 2018, hlm. 7).

Program AMD yang dilaksanakan ABRI merupakan perwujudan pembangunan nasional dari skala terkecil. Program ini mencakup semua aspek dalam konsep pembangunan nasional mulai dari pembangunan ekonomi, infrastruktur, sosial bahkan keagamaan. Keberhasilan program AMD pada masa Orde Baru perlu didalami kembali, khususnya mengenai gambaran tentang peran ABRI pada masa Orde Baru dan dalam pelaksanaan program AMD, serta dampak program ini terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan. Hasil pembahasan tersebut dapat dijadikan referensi bagi pemerintah masa sekarang untuk pelaksanaan program pembangunan desa dengan konsep yang sama bernama TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), maupun program pembangunan nasional lainnya.

Implementasi program ABRI Masuk Desa (AMD) menunjukkan variasi antarwilayah. Penelitian ini secara spesifik akan mengkaji pelaksanaan AMD di bawah Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi, yang mencakup Provinsi Banten dan Jawa Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode historis atau proses menguji secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu (Gottschalk, 1986, hlm. 39). Metode historis dipilih karena sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dilaksanakan, yakni merekonstruksi peritiwa dari masa lalu dengan cara mengkaji jejak-jejak peninggalan dari peristiwa tersebut secara kritis dan sistematis. Proses rekonstruksi yang dilakukan dalam penelitian dengan menggunakan metode historis menurut Ismaun (2005, hlm. 34) terdiri dari empat langkah penting, yakni heuristik, kritik, interprestasi, dan historiografi.

Heuristik adalah proses pengumpulan sumber sejarah berupa sumber benda, tertulis, dan lisan yang relevan dengan penelitian (Ismaun, 2005, hlm. 49). Sumber-sumber penelitian yang digunakan dalam langkah heuristik ini diperoleh dari beberapa tempat, di antaranya adalah Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, Perpustakaan Universitas Padjadjaran, Perpustakaan Umum Indramayu, Perpustakaan Batoe Api, Perpustakaan Dinas Sejarah Angkatan Darat, Perpustakaan Nasional serta beberapa perpustakaan digital seperti repository UPI, UPI, UNY, UNS, UNM, USU, dan UIN Syarif Hidayatullah. Sumber penelitian yang dikumpulkan berupa buku-buku, jurnal penelitian, skripsi, *e-book*, artikel, dan dokumen-dokumen sejarah lainnya.

Langkah kritik adalah langkah yang berusaha memilih dan memilah sumber-sumber penelitian yang sebelumnya telah dikumpulkan (Ismaun, 2005, hlm. 50). Kritik dilakukan untuk memperoleh fakta yang kredibel, di mana prosesnya terdiri dari kritik eksternal dan kritik internal.

Kritik eksternal dilakukan dengan memilih dan membandingkan semua jenis sumber penelitian yang diperoleh untuk menelaah aspek luar suatu sumber agar meminimalisir unsur subjektivitas sehingga sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang diperhatikan saat kritik eksternal adalah relevansi sumber-sumber yang diperoleh dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Sedangkan kritik internal adalah kritik yang berupa penilaian terhadap isi bahasan dari sumber tersebut, seperti kelengkapan pembahasan, kecocokan dengan sumber lainnya, dan sebagainya.

Langkah selanjutnya adalah interprestasi yakni usaha memahami hubungan antar fakta sejarah sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan rasional. Pada tahap ini dilakukan penafsiran terhadap fakta yang ditemukan menggunakan bentuk penafsiran sintesis,

atau dengan menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Penafsiran sintesis menyatakan bahwa peristiwa sejarah terjadi tidak hanya karna sebab tunggal tertentu. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Sjamsuddin (2007, hlm. 170) bahwa adanya peristiwa masa lalu diciptakan oleh beberapa faktor secara bersamaan.

Suatu fakta yang ditemukan tidak dapat mendeskripsikan apa yang terjadi secara sendiri, bahkan fakta tersebut kadang berbeda dengan sumber lainnya. Sehingga fakta-fakta tersebut perlu dihubungkan satu sama lain kemudian disusun agar saling berkaitan menjadi suatu rekonstruksi imajinantif yang memuat kesatuan fakta sejarah yang utuh dan memuat penjelasan terhadap pokok-pokok permasalahan penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan fakta-fakta pada penelitian ini adalah pendekatan interdisipliner, atau pendekatan yang meninjau suatu fakta menggunakan sudut pandang yang beragam, seperti ilmu sejarah, sosiologi, politik, dan sudut pandang lain yang masih dalam satu rumpun ilmu sosial.

Langkah terakhir metode historis adalah Historiografi atau langkah yang berupa penyusunan hasil penelitian menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam bentuk tulisan karya ilmiah yang logis, sistematis, dan akuntabel. Penyusunan karya ilmiah ini bertujuan agar hasil penelitian dan penafsiran yang sebelumnya dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Terbentuknya Program ABRI Masuk Desa

Program ABRI Masuk Desa (AMD) merupakan manifestasi dari konsep Dwifungsi ABRI. Sebagai bagian dari Operasi Bhakti ABRI, program ini mengimplementasikan kebijakan pimpinan melalui serangkaian kegiatan yang terstruktur. (Setiowati, 2015) Presiden Soeharto pada rapat pimpinan ABRI tanggal 27 Maret 1980 di Pekanbaru, memberikan amanat untuk kembali mewujudkan kemanunggalan ABRI dengan rakyat. Kemanunggalan tersebut dibutuhkan untuk melanjutkan dan melancarkan program pembangunan nasional yang telah dirancang sebagai upaya menciptakan stabilitas nasional dalam masyarakat Indonesia.

Amanat yang diberikan oleh Presiden Soeharto didasarkan atas gejolak politik dalam negeri, salah satunya akibat dari tragedi G30S PKI yang berdampak pada kondisi negara serta masyarakat. Atas dasar amanat tersebut, ABRI diberikan peran ganda sebagai dinamisator dan stabilisator dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Tambunan, dkk, 1984, hlm 171). ABRI diberikan dwifungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara serta berkuasa mengatur pemerintahan. Legitimasi pelaksanaan dwifungsi ABRI ditetapkan melalui dasar hukum yang berkesinambungan, dari Ketetapan MPRS no. II Tahun 1969, Ketetapan MPR no. IV Tahun 1978, serta Undang-Undang no. 82 Tahun 1982.

Tragedi G30S PKI tahun 1965 menimbulkan konflik dalam negeri sehingga, kondisi gejolak politik menjadi begitu pelik dan memanas. Oleh karena itu, pemerintahan Orde Baru memiliki orientasi pelaksanaan pembangunan yang berfokus untuk mengembalikan stabilitas politik nasional. Stabilitas politik merupakan syarat fundamental untuk menopang elemen pembangunan negara, yang mencakup bidang sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan negara. Indonesia yang memiliki identitas budaya yang beragam mengharuskan pemerintah masa Orde Baru untuk menciptakan stabilitas negara yang sangat baik.

Orde Baru secara batasan temporal dapat didefinisikan sebagai sebuah masa politik kekuasaan di Indonesia sejak 1966 sampai 1998. Istilah tersebut diciptakan untuk menandai kelahiran corak politik yang baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pada awal orde baru, pemerintahan yang terbentuk belum leluasa menentukan arah tujuan dan kepentingan bangsa karena eksistensi pemerintahan masih bersifat sementara

dan kepala negara masih berstatus pejabat sementara.

Setelah terselenggaranya pemilihan presiden tahun 1971, Orde Baru mulai memiliki eksistensi dan integritas. Tidak hanya kemandirian dan otoritas yang dimiliki pemerintah, pada masa tersebut pemerintah mendapatkan dukungan baik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional, di mana banyak negara yang ingin menjalin kerja sama bilateral, menempatkan Duta Besarnya, hingga memberikan bantuan dana serta mengizinkan investornya menanam dan mengembangkan usahanya Indonesia.

Dengan perkembangan kondisi tersebut, pemerintah Indonesia menyesuaikan dinamika yang terjadi dengan menyusun program-program yang berorientasi pada pembangunan dan memantapkan stabilitas nasional melalui pembinaan ideologi Pancasila.

Pemantapan stabilitas yang baik dapat terwujud dengan menerapkankan suatu strategi politik yang sesuai dan tepat. Sjamsuddin (2007) menjelaskan strategi politik yang dilakukan pemerintah sebagai upaya mengembalikan stabilitas nasional pada masa Orde Baru adalah dengan menerapkan konsep massa mengambang. Konsep tersebut bertujuan memutus mata rantai ideologi yang menghubungkan rakyat pedesaan dengan ideologi yang mengubungkan rakyat pedesaan dengan ideologi partai politik, kecuali saat pemilu. Konsep tersebut melibatkan ABRI dalam pelaksanaannya.

Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI berkewajiban aktif dalam segala usaha dan kegiatan masyarakat di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dalam rangka mencapai tujuan nasional. ABRI dilibatkan dalam bidang sosial politik karena dianggap sebagai organisasi yang paling siap mewujudkan pembangunan nasional. Dilihat dari kuantitas jumlah personel ABRI sangat memadai dan struktur organisasinya ada di setiap daerah, seperti Koramil, Kodim, Korem, hingga Kodam. Salah satu bentuk pelibatan ABRI dalam pembangunan nasional dan upaya menjaga stabilitas nasional adalah dengan dilaksanakannya program ABRI Masuk Desa (AMD).

Pelibatan ABRI dalam kegiatan sosial politik dan pemerintahan membuat dunia internasional menganggap Indonesia sebagai Negara Birokratik Otoriter dan cenderung tidak dinamis dalam hal kebijakan. Namun pelibatan ABRI dan pelaksaan kebijakan yang diatur satu komando oleh pusat membuat pembangunan nasional melalui program ABRI Masuk Desa lebih mudah dilaksanakan.

Program AMD merupakan bagian dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dicanangkan pada masa Orde baru. Repelita adalah suatu program pembangunan yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan berorientasi pada sektor-sektor yang masih tertinggal. Repelita merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan Panca Krida, yakni tugas pokok yang diberikan kepada Kabinet Pembangunan yang dibentuk pada tahun 1968. Tujuan utama Repelita disesuaikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang pada saat itu mayoritas hidupnya berada di pedesaan dan bergantung pada sektor pertanian (Arumdanie, 2018, hlm 133). Program AMD merupakan bagian dari Repelita III (1979-1984) yang menekankan pemerataan kebutuhan primer masyarakat serta kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Pada awal periode 1980-an ekonomi Indonesia bertransformasi dari sektor alam menjadi sektor industri. Namun sektor industri dianggap masih kurang mendorong laju perekonomian. Sumber pendapatan dari sektor industri belum mampu membiayai pembangunan dengan optimal. Hal tersebut membuat pemerintah Orde Baru pada saat itu memutar strategi dengan melakukan reorientasi ekonomi yang berfokus pada pembangunan.

Program AMD turut mendukung upaya pemerintah dalam membangun ekonomi masyarakat. Program AMD adalah salah satu terobosan dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional. Melalui Surat Keputusan no. Skep/566/V/1980, pimpinan

ABRI pada tanggal 30 Mei 1980 membentuk Panitia Kerja yang membahas Pola Dasar dan Pola Operasi TNI-ABRI Masuk Desa. Pola kegiatan tersebut bertujuan sebagai upaya untuk menghilangkan kesenjangan antar masyarakat. Di samping itu, program AMD bertujuan juga untuk meningkatkan konkretisasi kemanunggalan ABRI dan Rakyat.

Sebagai kekuatan sosial politik ABRI adalah salah satu golongan karya yang berkewajiban untuk ikut aktif dalam segala usaha atau kegiatan masyarakat dan negara di berbagai bidang dalam rangka mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, ABRI tidak membatasi diri pada pelaksanaan tugas pertahanan dan keamanan nasional saja, tetapi juga menjalankan tugasnya dengan melandaskan diri pada jiwa dan semangat pengabdian, bahu-membahu bersama rakyat melaksanakan kegiatan pembangunan di segala bidang untuk mencapai kesejahteraan nasional.

Implementasi Program ABRI Masuk Desa Tahun 1980-1998 di Kodam III Siliwangi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan nomor Skep/569/1980 tentang Pola Dasar Konkretisasi Kemanunggalan ABRI Masuk Desa dan Surat Keputusan nomor Skep/899/IX/1980, pelaksanaan AMD memiliki susunan sebagai berikut:

1. Pengendalian Tingkat Pusat

a. Pengendalian di tingkat pusat disebut dengan PJO, memiliki tugas mengarahkan serta mengendalikan seluruh kegiatan ABRI Masuk Desa. PJO bertanggungjawab terhadap Menhankam. Di setiap akhir tahun anggaran AMD akan disusun dan diselenggarakan rapat.
b. Kepala staf Angkatan dan Kapolri bertanggungjawab untuk memberikan bantuan penyelenggaraan kegiatan yang diperlukan selama kegiatan AMD berlangsung.

2. Pengendalian Tingkat KODAM

a. Pengendalian di tingkat KODAM disebut PKO dan diduduki oleh Pangdam. Tugas PKO yaitu untuk mengendalikan, mengkoordinir setiap kegiatan dan pelibatan matra baik matra darat, laut dan udara serta Polri di wilayahnya.
b. Memberikan arahan serta petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan agar terjalin keterpaduan dan kesatuan demi tercapainya dan terlaksananya program AMD di wilayahnya.

3. Pengendalian Tingkat KOREM

a. Pengendalian di tingkat KOREM disebut PKP dijabat oleh seorang komandan Korem atau yang dikenal sebagai Danrem. Bertugas untuk mengkoordinasikan pelibatan unsur-unsur Angkatan dan Polri serta menyiapkan kekuatan yang diperlukan serta mengemban mekanisme dan tata laksana.
b. PKP ditugaskan untuk melakukan pengawasan bersama-sama dengan unsur pengawas setingkat serta memberi petunjuk dan pengarahan demi terlaksananya kegiatan AMD

4. Pengendalian di Tingkat KODIM

Dandim selaku pelimpahan wewenang yang diberikan oleh korem agar mengendalikan pelaksaan AMD di tingkat kabupaten atau distrik. Program AMD dilaksanakan di desa bertujuan untuk menguji sistem pertahanan rakyat semesta dan menanamkan nilai bela negara pada masyarakat. Selain itu, desa dijadikan sebagai basis pembangunan nasional untuk mewujudkan desa Swasembada.

Desa menjadi wilayah yang sangat penting bagi perkembangan pembangunan nasional, karena mayoritas penduduk Indonesia bermukim di perdesaan. Pada tahun 1980, jumlah penduduk di kawasan pedesaan tercatat sebesar 77% (114 juta jiwa) dari 147 juta jiwa penduduk Indonesia (Pranoto, 2007, hlm 25). Satu dasawarsa kemudian, pada tahun 1990 persentase jumlah penduduk di kawasan pedesaan mengalami penurunan sebesar 8% menjadi 69% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.

Meskipun begitu, secara absolut jumlah penduduk di kawasan pedesaan pada saat itu mencapai 126 juta jiwa atau mengalami

kenaikan sebanyak 12 juta jiwa. Daerah yang memiliki jumlah dan kenaikan penduduk pedesaan tertinggi dari tahun 1980-1990 adalah daerah di pulau Jawa, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Desa menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa didefinisikan sebagai suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, langsung di bawah pembinaan Camat. Sedangkan, Pemerintahan Desa menurut peraturan tersebut adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

Bagi militer, desa dijadikan sebagai sumber kekuatan pertahanan dan keamanan serta menjadi markas militer tersembunyi sekaligus rumah logistik yang tak kasat mata (Amalik, 2013, hlm. 38). Namun kondisi pembangunan desa belum merata serta kesadaran masyarakat masih memerlukan pembinaan. Oleh karena itu, program AMD dilaksanakan di desa bertujuan untuk menguji sistem pertahanan rakyat semesta dan menanamkan nilai bela negara pada masyarakat. Selain itu, desa dijadikan sebagai basis pembangunan nasional untuk mewujudkan desa Swasembada.

Program AMD dilaksanakan di desa-desa sasaran, salah satunya desa-desa yang berada dalam cakupan wilayah Kodam III Siliwangi. Kodam III Siliwangi memiliki cakupan wilayah yang cukup strategis di bagian barat Pulau Jawa, atau sebagian besar daerah Provinsi Jawa Barat dan wilayah Provinsi Banten. Wilayah tersebut dinilai strategis karena terletak di pulau Jawa yang pada saat itu menjadi fokus pembangunan dan letaknya tidak jauh dari ibu kota negara.

Kesatuan militer Kodam III Siliwangi dibentuk pada 5 Oktober 1945 atas usul Oerip Soemihardjo. Cikal bakal Kodam III Siliwangi adalah Detasemen I Jawa Barat yang pada mulanya dipimpin oleh Mayor Jenderal Didi Kartasasmita. Detasemen I Jawa Barat diubah namanya menggunakan nama "Siliwangi" atas dasar kepercayaan masyarakat Jawa Barat bahwa pada zaman kerajaan Sunda, Jawa Barat memilki tokoh terkemuka yaitu Prabu Siliwangi. Divisi Siliwangi mampu melahirkan tokoh militer yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam aspek militer maupun non-militer seperti sosial-politik di Indonesia yang salah satunya tertuang dalam pelaksanaan program AMD.

Program AMD dicetuskan oleh M. Jusuf yang pada saat itu menjabat sebagai Menhamkam/Pangab. Program AMD dilandasi oleh Pancasila, UUD 1945, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Untuk merealisasikan program AMD, dikeluarkan SK Menhamkam/Pangab No. Skep/569/V/1980 tentang Pola Dasar Konkretasi Kemanunggalan TNI-ABRI dan Rakyat, serta SK Menhankam/Pangab No. Skep/899/IX/1980 tentang Organisasi dan Tugas Penanggung Jawab Operasional TNI-ABRI Masuk Desa yang membentuk susunan pelaksana dan pembiayaan operasional AMD.

Susunan organisasi pelaksana program AMD terdiri dari pengendali dari berbagai tingkat. Pengendali di tingkat pusat disebut Penanggung Jawab Operasional (PJO), memiliki tugas mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan ABRI Masuk Desa. PJO dijabat Kepala Staf Angkatan dan Kapolri. Kemudian pengendali di tingkat Kodam disebut Pengendali Kegiatan Operasional (PKO) dijabat oleh Pangdam. PKO bertugas untuk mengendalikan, mengoordinir semua kegiatan, serta pelibatan satuan baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun Polri di wilayahnya.

Pengendali di tingkat Korem disebut Penanggung Jawab Keberhasilan Pelaksanaan (PKP) dijabat oleh Danrem. PKP memiliki tugas untuk mengoordinasikan pelibatan unsur-unsur Angkatan dan Polri, menyiapkan kekuatan yang diperlukan serta pengembangan mekanisme dan tata laksana. Selain itu PKP juga bertugas untuk melakukan pengawasan serta memberikan petunjuk atau pengarahan

demi terlaksananya kegiatan ABRI Masuk Desa. Sedangkan pengendali di tingkat Kodim dijabat oleh Dandim, yang menerima pelimpahan wewenang dari PKP untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan ABRI Masuk Desa di lapangan.

Susunan organisasi pelaksanan program AMD juga terdiri dari Pati Pelaksana Harian (Pati Lakhar), Staf Perencanaan, Staf Koordinator Keuangan dan Logistik, Staf Pengawasan, Staf Sekretariat, Tim Asistensi, Komandan KODIM, serta Satuan Pelaksana dan Komandan Satuan Tugas. Selain dibentuk organisasi pengendali AMD, organisasi ini juga diisi para pejabat yang ditunjuk terdiri dari Pati/Pamen/Pama/Karyawan Sipil Staf Mabes ABRI-Staf Angkatan/Polri (Dispenad, 1988, hlm. 73).

Program AMD bertujuan untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat akan bela negara demi melaksanakan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata). Selain itu, program AMD memiliki tiga tujuan pokok, yaitu menguji sistem pertahanan keamanan rakyat semesta di lapangan, membantu rakyat dalam semua aspek kehidupan, serta mengumpulkan permasalahan untuk dicari pemecahnya (Notosusanto & Poesponegoro, 1993, hlm. 600). Tujuan tersebut direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial berupa fisik dan non-fisik. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat pedesaan untuk meningkatkan keikutsertaan, gotong royong warga desa dalam pembangunan manusia Indonesia.

Bentuk kegiatan AMD yang berupa fisik membantu kesejahteraan rakyat di pedesaan dengan perbaikan dan peningkatan sarana prasarana. Program AMD yang berupa fisik antara lain pembuatan atau perbaikan akses daerah dan bangunan yang menunjang kegiatan perekonomian, kegiatan penunjang bidang kesejahteraan seperti puskesmas, kegiatan penunjang bidang lingkungan hidup seperti terasering dan reboisasi, serta kegiatan penunjang fasilitas umum lainnya seperti rumah ibadah, balai desa, gedung sekolah dan lainnya.

Sedangkan kegiatan AMD yang berupa non-fisik berkaitan dengan usaha menyadarkan masyarakat desa akan tanggungjawab, hak, dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Kegiatan ini dititikberatkan pada pemberikan penerangan, ceramah, dan penyuluhan yang terdiri dari bidang kesadaran bernegara seperti penyuluhan P4, bidang kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan, bidang bela negara seperti Siskamling dan penyuluhan bela negara, serta bidang keamanan dan ketertiban masyarakat seperti penanggulangan kenakalan remaja dan masalah narkotika.

Periode awal pelaksanaan program AMD dilaksanakan pada 20 Agustus 1980 sampai 2 September 1981 yang diberi nama Manunggal I. Program tersebut melibatkan 51 SSK dan meliputi 49 Kabupaten, 101 Kecamatan, dan 125 Desa. Setelah Manunggal I selesai, program AMD dilanjutkan hingga total 49 kali program dari 1980 sampai 1998.

Dampak Program ABRI Masuk Desa Terhadap Pembangunan Daerah

Program AMD memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap desa sasaran pelaksanaan. Dampak yang paling dirasakan adalah munculnya persatuan antara ABRI dengan rakyat. Rakyat memberikan tanggapan baik kepada ABRI, dan bersama satuan-satuan ABRI masyarakat ikut serta bergotong-royong pada setiap pelaksanaan kegiatan program ABRI Masuk Desa. Dampak dari program tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek kehidupan negara, di antaranya dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak politik.

Dampak sosial yang ditimbulkan pada program ini adalah adanya persatuan antara ABRI dengan rakyat. Persatuan tersebut merupakan suatu jawaban dari kritik yang ditunjukkan terhadap ABRI, yang pada saat itu sempat mengalami erosi kepercayaan akibat besarnya kekuatan dan arogansi pihak militer

(Singh, 1996, hlm. 111). Persatuan ABRI dengan rakyat dilihat dari kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjalankan program AMD yang tumbuh akibat faktor kebersamaan ketika melaksanakan program-program, dan metode yang dilakukan ABRI pada setiap pelaksanaan program AMD yakni dengan mendidik dan mengajak masyarakat dalam berbagai kegiatan. Kesadaran masyarakat memudahkan pelaksanaan program AMD sehingga progam pembangunan nasional dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Selain itu, program AMD menumbuhkan kesadaran bernegara dan bela negara kepada masyarakat. Hal tersebut tercermin dari kegiatan yang bersifat non-fisik, seperti sosialisasi P-4 dan sebagainya.

Kemampuan ABRI sebagai dinamisator didukung kemampuan untuk berkomunikasi dan kemanunggalannya dengan rakyat, menjadi potensi ABRI untuk membantu masyarakat menegakkan asas-asas serta tata cara kehidupan bermasyarakat, termasuk rencana serta proyek pembangunan (Soebijono, dkk, 1992, hlm. 93). Oleh karena itu, program AMD dianggap dapat membantu pemerintah dalam mencerdaskan dan menyejahterakan masyarakat serta menjalankan pembangunan nasional.

Program AMD memiliki potensi sebagai salah satu cara untuk memperkuat ketahanan dan stabilitas nasional, karena outputnya yang dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat desa atas kedudukan dan perannya, serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Selain dampak sosial, program AMD menimbulkan dampak ekonomi yang dirasa sangat siginifikan. Melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan, program AMD dinilai mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan. Pembangunan dan perbaikan akses serta pembukaan daerah yang terisolir adalah salah satu solusi tepat dan bermanfaat bagi masyarakat, karena dapat mempermudah mobilitas ekonomi. Dibangun dan diperbaikinya jalan, jembatan, dan pasar membuat aktivitas perekonomian masyarakat di daerah pedesaan dapat berjalan dengan baik.

Dalam aspek politik, program AMD menciptakan kontrol sosial terhadap masyarakat untuk mencegah penyebaran ideologi lain selain Pancasila, khususnya komunisme. Pemerintah pada saat itu melakukan tindakan preventif dengan dibantu program AMD untuk melakukan sosialisasi bahaya laten komunis kepada masyarakat, serta penguatan pemahaman ideologi Pancasila.

Paham ideologi komunisme menjadi fokus pencegahan karena dalam kurun periode waktu bersamaan penyebaran ideologi tersebut tengah marak terjadi di beberapa negara kawasan Asia. Selain itu, pencegahan penyebaran ideologi komunisme merupakan salah satu dampak dari tragedi G30S PKI yang terjadi pada tahun 1965.

ABRI melakukan kontrol sosial dengan mendirikan pos-pos militer yang hampir terdapat di seluruh tingkatan masyarakat. Pos-pos militer tersebut menempatkan personil ABRI di seluruh tingkatan dari Kodam di tingkat Provinsi, Krem setingkat Karesidenan, Kodim setingkat Kabupaten/Kota, Koramil setingkat Kecamatan, hingga Babinsa setingkat Kelurahan/Desa.

Adanya kontrol sosial tidak hanya berdampak positif bagi masyarakat. Pengawasan aktivitas politik masyarakat desa membuat masyarakat merasa terbatasi. Meskipun begitu, pembatasan tersebut dilakukan untuk mencegah terbentuknya organisasi bawah tanah dan muncul kembalinya organisasi kekirian yang dapat mengancam stabilitas nasional serta keberlangsungan pemerintahan Orde Baru.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang terbentuknya program ABRI Masuk Desa terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbentuknya program AMD berasal dari kondisi sosial politik dalam negeri yang masih belum stabil, yang merupakan dampak

peristiwa G30S PKI tahun 1965. Kondisi tersebut mempengaruhi keadaan ekonomi dan sosial Indonesia, yang akhirnya berdampak juga pada pergantian kekuasaan pemerintahan. Pemerintahan yanng baru kemudian memanfaatkan kekuatan dari personel militer dalam setiap kegiatan termasuk pembangunan nasional. Pelibatan militer yang memiliki basis kuat di setiap daerah bertujuan agar program pembangunan tersebut dapat dilakukan secara tepat sasaran dan merata.

Faktor eksternal terbentuknya program ABRI Masuk Desa yaitu pengaruh politik internasional di mana pada masa tersebut paham komunisme di dunia tengah berkembang. Pada periode tersebut paham komunisme tengah berkembang di Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok kemudian berpengaruh terhadap wilayah-wilayah lain di kawasan Asia. Dengan melakukan pencegahan penyebaran komunisme, relasi Indonesia dengan negara lain seperti Eropa dan Amerika Serikat kian erat.

Faktor-faktor tersebut memengaruhi keadaan ekonomi dan sosial di Indonesia. Pemerintah kemudian memanfaatkan kekuatan militer untuk melakukan pembangunan nasional dan mengembalikan stabilitas nasional dalam negeri, melalui program AMD.

Program AMD dicetuskan oleh M. Jusuf selaku Menhamkam/Pangab, bertujuan untuk menguji sistem pertahanan rakyat semesta, membantu rakyat dalam setiap aspek kehidupan, serta mengumpulkan permasalahan untuk dicari pemecahnya. Bentuk kegiatan program AMD terdiri dari kegiatan fisik seperti pembangunan sarana dan prasarana desa, serta kegiatan nonfisik seperti pengembangan sumber daya manusia dan penanaman bela negara. Program AMD dilaksanakan perperiode setiap dua tahun sekali. Program ini berhasil dilakukan sebanyak 49 kali program sejak awal dilaksanakannya sampai tahun 1980.

Pelaksanaan program AMD terbilang cukup berhasil sebagai program pembangunan yang berkelanjutan dari tingkat desa di seluruh Indonesia. Hingga saat ini masih terdapat program pembangunan yang mengusung tema serupa ABRI Masuk Desa atau mengusung tema pembangunan dari daerah desa dengan memanfaatkan personel militer, khususnya di daerah 3T atau daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Program tersebut adalah program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Pelaksanaan ABRI Masuk Desa (AMD) di Jawa Barat pada periode 1980-1998 melibatkan kegiatan fisik berupa pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa, serta kegiatan non-fisik yang meliputi bidang kesadaran bernegara, kesejahteraan masyarakat, bela negara, serta keamanan dan ketertiban. Program ini dilaksanakan secara periodik melalui Program Manunggal dengan melibatkan unsur ABRI dan masyarakat desa, dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Dampak yang paling dirasakan dari program ABRI Masuk Desa adalah munculnya persatuan antara ABRI dengan rakyat. Selain itu dampak program ini dapat dilihat dari 3 aspek yang saling berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat, di antaranya dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak politik.

Dampak sosial dari pelaksanaan program ABRI Masuk Desa yang paling terasa adalah merekatkan hubungan rakyat dan militer yang sebelumnya sempat renggang. Rekatnya hubungan tersebut berpengaruh juga terhadap peningkatan kepercayaan rakyat Indonesia kepada ABRI yang semakin menguatkan ketahanan nasional.

Dampak ekonomi dari pelaksanaan program ABRI Masuk Desa adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat akibat pembangunan akses yang mempermudah mobilitas ekonomi desa. Dengan adanya perbaikan jalan, pembangunan jembatan, dan perbaikan sarana prasarana di desa, membuat aktivitas ekonomi masyarakat desa kembali hidup.

Sedangkan dampak politik dari adanya program ABRI Masuk Desa adalah terbentuknya suatu kontrol sosial terhadap

masyarakat untuk mencegah penyebaran ideologi komunisme. Keamanan juga tercipta dengan adanya program ABRI Masuk Desa yang membangun pos-pos jaga di setiao desa. Namun, hal tersebut menyebabkan munculnya rasa takut masyarakat terhadap pemerintahan, karena masyarakat merasa selalu diawasi. Ketakutan dikhawatirkan membuat dinamika politik menjadi kurang harmonis baik di lingkup desa maupun nasional.

REFERENSI

Amalik, M. J. (2013). Pemberdayaan masyarakat desa dalam ayunan politik. *Jurnal Mandatory, 10*(1).

Arumdanie, K. (2018). *Soeharto: Ketahanan pangan dalam pembangunan nasional.* Jakarta: Yayasan Harapan Kita.

Bustanil, B., Zulham, Z., Ali, M. R. H., & Zulhilmi, Z. (2022). Peran program tni manunggal membangun desa (tmmd) (studi pada kodim 0103 kapubaten aceh utara, desa alue dua kecamatan nisam antara). *JPP Jurnal Politik dan Pemerintahan, 7*(1), 74-101.

Disjarhad. (2018). *Lampiran-lampiran: manunggal iv buku ii*. Bandung: Dinas Sejarah Angkatan Darat.

Dispenad. (1988). *Sewindu tni-abri masuk desa 1980-1988.* Jakarta: Dinas Penerangan TNI-ABRI Angkatan Darat.

Gottschalk, L. (1986). *Mengerti sejarah.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Ismaun. (2005). *Pengantar belajar sejarah sebagai ilmu dan wahana pendidikan.* Bandung: Historia Utama Press.

Kingsbury, D. (2005). *Power politics and the Indonesian military.* Routledge.

Leni, N. (2017). Keterlibatan militer dalam kancah politik di Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 9*(1), 31-45.

Moerdani, L. B. (1987). Perkembangan Situasi Dunia dan Ketahanan Nasional Kita di Dalamnya. *Analisis CSIS, 16*(1), 4-18.

Morgan, D. O. (1996). The Cambridge history of China. Volume 6. Alien regimes and border states, 907–1368. Edited by Herbert Franke and Denis Twitchett. *Journal of the Royal Asiatic Society, 6*(2), 285-286.

Mukmin, H. (1991). *TNI dalam politik luar negeri*. Jakarta: Sinar Harapan.

Oxford Analytica. (2018). *Indonesia's military will be less politicised.* Emerald Expert Briefings, (oxan-db).

Pangumpia, P., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2018). Peran tentara nasional indonesia dalam pembangunan melalui program tentara manunggal membangun desa (tmmd)(suatu studi di kecamatan bunaken kota manado). *Jurnal Eksekutif, 1*(1).

Poesponegoro, M. D & Notosusanto, N. (1993). *Sejarah nasional indonesia Jilid VI.* Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka.

Porter, R. (1996). Indonesia: a country study. Edited by William H. Frederick and Robert L. Worden.(Area Handbook Series, 550–39.) pp. xlix, 462, illus., 18 maps and figs. Washington DC, Federal Research Division Library of Congress, 1993. *Journal of the Royal Asiatic Society, 6*(2), 284-285.

Purwatiningsih, E. (2013). Efektifitas pelaksanaan program tni manunggal membangun desa (tmmd) dalam mewujudkan ketahanan wilayah. J*urnal Ketahanan Nasional, 19*(3), 130-138.

Setiowati, I. N. (2015). Perkembangan ABRI masuk desa (amd) tahun 1980-1998. *Avatara: E-Jurnal Pendidikan Sejarah, 3*(1), 101-114.

Singh, B. (1996). *Dwifungsi ABRI.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi sejarah.* Yogyakara: Penerbit Ombak.

Soebijono,. dkk. (1992). *Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan peranannya dalam kehidupan politik di indonesia*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.

Sofuan, T. K. (2023). Mengulik sejarah penerapan dwifungsi abri pada masa

Orde Baru. *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah, 9*(2), 162-170.

Suryawan, I. P. N., & Sumarjiana, I. K. L. (2020). Ideologi Dibalik Doktrin Dwifungsi ABRI. *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP), 10*(2).

Tambunan, A. S. S. dkk. (1984). *Pejuang dan prajurit: konsepsi dan implementasi dwifungsi ABRI.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Zahana, Y., Purnama, D. H., & Sartika, D. D. (2024). Gerakan sosial kelompok perempuan pejuang seribandung (kpps) dalam konflik tenurial di ogan ilir. *Jurnal Analisa Sosiologi, 13*(3).